



INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Belitung.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tanjungpandan, 04 Agustus 2025

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG



PARYANTA, S.Pd., S.IP., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 196701281989031003

DAFTAR ISI

		Hal.
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	12
	3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	12
BAB V	PENUTUP.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

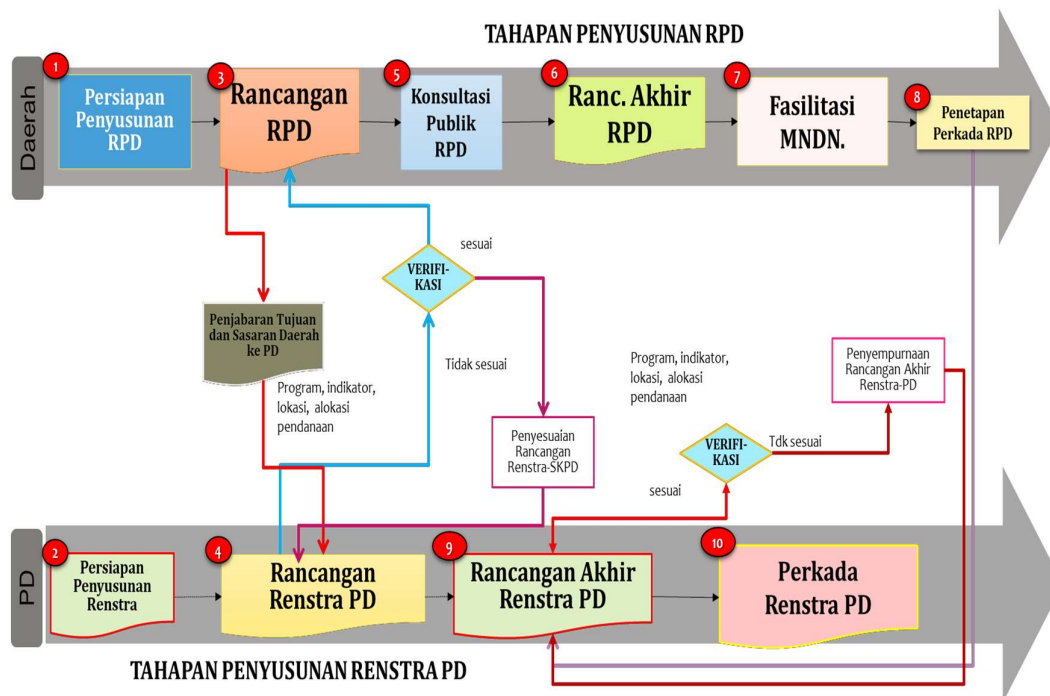
1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);
 30. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
 31. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
 32. Peraturan Bupati Belitung Nomor 46 tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 46);

33. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD Tahun 2025
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana kerja Anggaran (RKA-P)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan pelayananan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	
			5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (persen)	100,00		100,00		100											0,00%		100,00				
		Indeks profesionalitas ASN Perangkat Daerah (persen)	86,60	-	90,91	11.160.704.300	86,6	10.999.621.107		983.162.027		3.911.567.489		-		-	-	0,00%	44,50%	86,50	16.055.433.816			0,00%
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah (persen)	100,00		100,00		100											0,00%		100,00				
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (persen)	100,00		100,00		100											0,00%		100,00				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	10,00	8.243.750	10	6.881.250	-	-	6	-	-	-	6	-	60,00%	0,00%	10,00	8.243.750	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		-	3,00	1.999.750	3	2.681.250	-	-	2	-			2	-	66,67%	0,00%	5,00	1.999.750	0,00%	0,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.184.500	1	1.200.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.184.500	0,00%	0,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.185.000	1	1.200.000	-	-	1	-			1	-	100,00%	0,00%	2,00	1.185.000	0,00%	0,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.405.500	1	600.000	-	-	1	-			1	-	100,00%	0,00%	2,00	1.405.500	0,00%	0,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD (Dokumen)		-	1,00	1.000.000	1	600.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.000.000	0,00%	0,00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		-	3,00	1.469.000	3	600.000	-	-	2	-			2	-	66,67%	0,00%	5,00	1.469.000	0,00%	0,00%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	3,00	9.215.662.489	3	9.847.743.567	-	848.292.816	-	3.628.165.676	-	-	-	-	0,00%	45,46%	3,00	13.692.120.981	0,00%	0,00%		
	Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	40,00	9.213.734.639	41	9.845.274.567	82	848.292.816	123	3.627.880.176				205	4.476.172.992	100,00%	45,47%	245,00	13.689.907.631	0,00%	0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		-	1,00	954.700	1	1.647.000	-	-	-	285.500			-	285.500	0,00%	17,33%	1,00	1.240.200	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		-	2,00	973.150	2	822.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	2,00	973.150	0,00%	0,00%		

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dokumen)		-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		-			0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	0,00	-	40,00	526.958.327	45	253.689.203	4	29.098.200	32	77.219.656	-	-	36	106.317.856	80,00%	41,91%	40,00	633.276.183	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	1,00	20.600.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	20.600.000	0,00%	0,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		-	1,00	1.073.000	1	2.647.350	-	705.000	-	1.557.500	-	-	-	2.262.500	0,00%	85,46%	1,00	3.335.500	0,00%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		-	40,00	505.285.327	41	251.041.853	4	28.393.200	32	75.662.156	-	-	36	104.055.356	87,80%	41,45%	76,00	609.340.683	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya administrasi umum Perangkat Daerah (Persen)	0,00	-	75,00	673.191.878	1	339.315.187	-	70.306.517	-	76.571.761	-	-	-	146.878.278	0,00%	43,29%	75,00	820.070.156	0,00%	0,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	1,00	5.993.000	1	5.260.845	-	-	-	2.041.734	-	-	-	2.041.734	0,00%	38,81%	1,00	8.034.734	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	2,00	42.150.500	2	34.189.519	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	42.150.500	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	1,00	12.019.000	1	14.380.383	-	-	-	1.595.000	-	-	-	1.595.000	0,00%	11,09%	1,00	13.614.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	2,00	158.139.300	2	142.280.640	-	14.850.100	-	34.940.680	-	-	-	49.790.780	0,00%	34,99%	2,00	207.930.080	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		-	1,00	9.419.800	1	3.078.600	-	-	-	557.000	-	-	-	557.000	0,00%	18,09%	1,00	9.976.800	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	1,00	7.612.500	1	8.125.200	-	810.000	-	2.340.000	-	-	-	3.150.000	0,00%	38,77%	1,00	10.762.500	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	12,00	437.857.778	12	132.000.000	2	54.646.417	3	35.097.347	-	-	5	89.743.764	41,67%	67,99%	17,00	527.601.542	0,00%	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah (jenis)	0,00	-	3,00	160.251.000	2	93.010.230	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3,00	160.251.000	0,00%	0,00%
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		-	71,00	103.341.000	20	11.246.520	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	71,00	103.341.000	0,00%	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	6,00	56.910.000	20	81.763.710	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	6,00	56.910.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran (Persen)	0,00	-	75,00	259.570.586	1	296.571.000	-	32.815.994	-	90.982.596	-	-	-	123.798.590	0,00%	41,74%	75,00	383.369.176	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	12,00	1.525.000	12	680.000	1	41.000	1	50.000	-	-	2	91.000	16,67%	13,38%	14,00	1.616.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	12,00	125.332.786	12	130.000.000	2	18.950.744	3	35.635.596	-	-	5	54.586.340	41,67%	41,99%	17,00	179.919.126	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	12,00	132.712.800	12	165.891.000	2	13.824.250	3	55.297.000	-	-	5	69.121.250	41,67%	41,67%	17,00	201.834.050	0,00%	0,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik (jenis)	0,00	-	4,00	316.826.270	4	162.410.670	-	2.648.500	-	38.627.800	-	-	-	41.276.300	0,00%	25,41%	4,00	358.102.570	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	24,00	89.918.100	26	105.723.040	5	2.648.500	11	31.443.300	-	-	16	34.091.800	61,54%	32,25%	40,00	124.009.900	0,00%	0,00%

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	-	3,00	7.012.400	4	7.342.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3,00	7.012.400	0,00%	0,00%	
	Pendampingan dan Asistensi	Laporan pelaksanaan pendampingan dan asistensi (Laporan)	0,00	-	6,00	267.383.994	15	174.171.721	1	-	-	20.354.990	-	-	-	1	20.354.990	6,67%	11,69%	6,00	287.738.984	0,00%	0,00%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	-	6,00	23.783.100	7	26.904.282	-	-	-	4.700.000	-	-	-	-	4.700.000	0,00%	17,47%	6,00	28.483.100	0,00%	0,00%	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	-	1,00	52.841.882	1	8.712.900	-	-	-	435.000	-	-	-	-	435.000	0,00%	4,99%	1,00	53.276.882	0,00%	0,00%	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	-	4,00	189.665.262	6	131.769.220	1	-	-	15.219.990	-	-	-	1	15.219.990	16,67%	11,55%	5,00	204.885.252	0,00%	0,00%	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	-	0,00	1.093.750	1	6.785.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	1.093.750	0,00%	0,00%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										12,10%	11,21%					
							Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
							11.388.876.258	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										91,47%	48,49%				
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Belitung**

No	Program	Persentase Rata-Rata Capaian Program PD (%) / Predikat			
		Persentase Kinerja	Predikat	Persentase Keuangan	Predikat
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	93,94%	Sangat Tinggi	44,50%	Sangat Rendah
2	Penyelenggaraan Pengawasan	28,50%	Sangat Rendah	14,09%	Sangat Rendah
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	12,10%	Sangat Rendah	11,21%	Sangat Rendah
	Rata-Rata Capaian Kinerja	91,47%	Sangat Tinggi	43,43%	Sangat Rendah

Keterangan Predikat:

SR : Sangat Rendah (≤ 50 %)
R : Rendah (51 % $\leq$ 65 %)
S : Sedang (66 % $\leq$ 75 %)
T : Tinggi (76 % $\leq$ 90 %)
ST : Sangat Tinggi (91 % $\leq$ 100 %)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **91,47%** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **43,43%**. Berdasarkan capaian tersebut, maka predikat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2025 adalah Sangat Tinggi (ST), dan untuk predikat penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten Belitung adalah Sangat Rendah (SR).

Persentase capaian kinerja dan keuangan tersebut merupakan perhitungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dari seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2025.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Belitung dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2025 menetapkan 3 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 11 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 39 sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari kegiatan:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah
3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari kegiatan:

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3. Reviu Laporan Kinerja
 - 4. Reviu Laporan Keuangan
 - 5. Pengawasan Desa
 - 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, terdiri dari kegiatan:

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

- B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, meliputi sub kegiatan:
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Seluruh program dan kegiatan di atas diharapkan mendukung Visi dan Misi Bupati Periode 2024-2026.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026 (terlampir) :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini disusun dengan harapan pencapaiannya sesuai dengan target kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dalam Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya, baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Belitung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, kemauan, semangat dan keseriusan segenap aparat Inspektorat Kabupaten Belitung.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil atau tidak akan mempunyai arti dan manfaat khususnya bagi kepentingan pemerintah daerah, serta masyarakat Kabupaten Belitung pada umumnya.

Tanjungpandan, 4 Agustus 2025

INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG



RARIANTA, S.Pd., S.IP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 196701281989031003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. BELITUNG
TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Revisi OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Prakirasan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakirasan Maju Rencana Tahun 2026		Pernyataan Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Daerah									
										Sebelum	Sesudah	KKPD 2025	APBD 2025	KKPD Perubahan 2025		Nasional											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	6				Inspektorat							11.529.070.640,00	12.155.417.878,00	11.385.295.243,00							14.920.000.000,00						
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							11.529.070.640,00	12.155.417.878,00	11.385.295.243,00							14.920.000.000,00						
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH							11.529.070.640,00	12.155.417.878,00	11.385.295.243,00							14.920.000.000,00						
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100,00 86,60 %	100,00 86,60 %	10.862.191.198,00	11.576.938.436,00	10.937.840.092,00							13.935.000.000,00						
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen	9.313.650,00	9.313.650,00	9.313.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		14.800.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3.497.350,00	3.497.350,00	2.681.250,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			2.000.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.800,00	1.499.800,00	1.200.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.499.800,00	1.499.800,00	1.200.000,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.500.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																					
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	911.300,00	911.300,00	600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																					
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	810.100,00	810.100,00	600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			1.800.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.095.300,00	1.095.300,00	600.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	3 Dokumen	9.042.828.767,00	9.848.821.367,00	9.848.821.367,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		12.007.200.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	9.039.281.967,00	9.845.274.567,00	9.845.274.567,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			12.000.000.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																					
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2 Laporan	2.002.400,00	2.002.400,00	1.137.000,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			3.000.000,00	INSPEKTORAT					
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																					

						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2 Dokumen	1 Dokumen	1.544.400,00	1.544.400,00	901.500,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			4.200.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		0,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			0,00	INSPEKTORAT				
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			0,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	-			45 Orang	45 Orang	443.426.450,00	428.381.250,00	428.381.250,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		461.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	1 Paket	25.245.200,00	0,00	0,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			55.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																								
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	1 Dokumen	2.893.850,00	2.893.850,00	2.647.350,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			6.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					41 Orang	41 Orang	415.287.400,00	425.487.400,00	246.442.015,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			400.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	649.310.521,00	552.328.939,00	552.328.939,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur		723.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	5.987.118,00	5.987.118,00	3.625.260,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			8.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	59.164.501,00	59.495.886,00	34.189.519,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			80.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																								
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	46.390.896,00	16.349.079,00	10.069.143,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			40.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	179.995.806,00	179.080.056,00	110.210.340,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			190.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	12.987.000,00	12.631.600,00	2.664.600,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			35.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen	14.785.200,00	14.785.200,00	7.317.120,00	Kab. Belitung, Tanjung Pandan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			20.000.000,00	INSPEKTORAT							
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	330.000.000,00	264.000.000,00	132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			350.000.000,00	INSPEKTORAT							

18

	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	---	----	----	------	------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	199.999.580,00	183.699.580,00	131.769.220,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			270.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																	
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	9.985.319,00	9.985.319,00	6.785.319,00	Kab. Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			15.000.000,00	INSPEKTORAT
												J U M L A H	11.829.070.640,00	12.195.417.878,00	11.885.295.245,00							14.920.000.000,00	